

CASCADING DINAS SOSIAL 2024

TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN RPJMD

MISI I (Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan)
Tujuan (Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi yang Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Lokal) Indikator Tujuan (Gini Rasio)

MISI III (Memantabkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan dan Kesehatan Yang Merata)
Tujuan (Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis)
Indikator Tujuan (Indeks Kesalehan Sosial)

SASARAN DAN INDIKATOR RPJMD

SASARAN I (Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi)
Indikator Sasaran (Persentase PPKS)

SASARAN III (Terwujudnya Solidaritas Sosial Masyarakat)
Indikator Sasaran (Indeks Solidaritas Sosial)

SASARAN DAN INDIKATOR OPD

Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar

PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM OPD

Program Pemberdayaan Sosial
1. Persentase PSKS yang aktif (100%)

Program Rehabilitasi Sosial
1. Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar (9,2%)

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
1. Persentase Bantuan Sosial yang tersalurkan (100%)

A. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota (Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota) :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota. Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota. Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota

A. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial (Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar):
1. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar. Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota
B. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial (Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar) :
1. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan. Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Alat Bantu. Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial. Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar. Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota

A. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota (Persentase DTKS yang di update) :
1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota. Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota
2. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

A. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota (Persentase Korban bencana yang tertangani):
1. Penyediaan Makanan. Jumlah Orang yang Mendapatkan Permaknaan 31 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Sandang. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi. Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan. Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Pelayanan Dukungan Psikososial. Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota
B. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota.
1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana. Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota

A. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan):
1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota. Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota